

ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan UUD Tahun 1945. Terdapat permasalahan dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, hingga muncul polemic dalam masyarakat akibat Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji alasan MK dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023 terkait Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim serta dijadikan dasar dalam memutus perkara (*Ratio decidendi*) dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD Tahun 1945, yaitu : Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait Kewenangan MK, Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan perkara tersebut, Pertimbangan hukum oleh Hakim terkait pokok perkara dalam Surat Permohonan, Konklusi (*Conclusio*), Amar putusan dan/atau putusan oleh Hakim. Akibat hukum terhadap Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah terjadi polemic pro dan kontra dalam masyarakat, bahkan sejumlah guru besar dan akademisi serta pegiat pemilu melakukan eksaminasi terhadap putusan MK tersebut, selain itu terjadi laporan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua MK Anwar Usman bermunculan sehari setelah mahkamah memutus uji materi syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden tersebut diputus.

Kata Kunci : Ratio decidendi, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Pemilu.

ABSTRACT

Elections are a means available for the people to exercise their sovereignty in accordance with the principles contained in the preamble to the 1945 Constitution. There are problems in Decision no. 90/PUU-XXI/2023 concerning the Minimum Age Limit for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates, until a polemic emerged in society as a result of Decision No. 90/PUU-XXI/2023. This research aims to find out and examine the Constitutional Court's reasons for deciding case No. 90/PUU-XXI/2023 regarding the Minimum Age Limit for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates, as well as the resulting legal consequences.

The research method used in this research is qualitative research with a normative juridical approach, the research specifications used are analytical descriptive, data collection techniques are carried out by examining primary data and secondary data obtained through library studies in the form of books, documents and other sources. other theoretical sources.

The results of the research show that the reasons used as legal considerations by the Judge and used as the basis for deciding the case (Ratio decidendi) in Decision No. 90/PUU-XXI/2023 concerning Review of Law No.7 of 2017 concerning Elections against the 1945 Constitution, namely: Legal considerations by the Judge regarding the Authority of the Constitutional Court, Legal considerations by the Judge regarding the legal position of the Petitioner in filing the case, Legal considerations by the relevant Judge main case in the Application Letter; Conclusion (Conclusio), decision and/or decision by the Judge. Legal consequences of Decision no. 90/PUU-XXI/2023 Concerning the Minimum Age Limit for Presidential Candidates and Vice Presidential Candidates, there is a polemic of pros and cons in society, even a number of professors and academics as well as election activists conducted an examination of the Constitutional Court's decision, apart from that there were reports of alleged ethical violations by Chief Constitutional Justice Anwar Usman appeared the day after the court decided on the judicial review of the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates.

Keywords: Ratio decidendi, Authority, Constitutional Court, Election.